

## Dua Kabupaten Berlakukan Moratorium Tambang

DUA kabupaten di Kalimantan Selatan (Kalsel), yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah, menerapkan moratorium atau penghentian sementara kegiatan tambang. Alasannya, aktivitas pertambangan dinilai dapat mengancam terjadinya kerusakan lingkungan.

Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, kemarin, mengatakan pemerintah daerah tengah melakukan penertiban dan penataan aktivitas pertambangan di Kalsel.

Menurut Rudy, pihaknya mendukung kebijakan moratorium yang dikeluarkan kabupaten. Kebijakan itu diharapkan mampu menekan laju kerusakan lingkungan. "Kerusakan kawasan hutan di Kalsel saat ini cukup parah."

Menurut data Dinas Kehutanan Kalsel, tercatat luas lahan kritis di Kalsel mencapai 600 ribu hektare.

Dari 1,6 juta hektare kawasan hutan yang ada, seluas 1,4 juta hektare telah dialih fungsikan bagi bidang lain meliputi pertambangan seluas 658.742 hektare, perkebunan seluas 84.779 hektare, HTI seluas 383.683 hektare, dan HPH seluas 281.966 hektare.

Sebaliknya, kalangan pengusaha batu bara menilai Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) Nomor 453/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Per-

airan di Kalsel secara hukum tidak berlaku lagi.

"Peraturan itu sudah gugur dengan sendirinya," papar Sekretaris Dewan Pengurus

Asosiasi Pemegang Kuasa Pertambangan dan Pengusaha Tambang (Aspektam) Kalsel Muhammad Solihin, kemarin.

Setelah dikaji lebih lanjut, tambah

Solihin, peraturan tersebut ternyata telah digugurkan UU No 41/1999 Pasal 83 Bab XII tentang Ketentuan Penutup.

Pada UU No 26/2007 tentang Tata Ruang Pasal 79 juga menyatakan UU No 24/1992 tentang Tata Ruang dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Sebelumnya, Aspektam mengemukakan sedikitnya lebih dari 90 perusahaan kuasa pertambangan (KP) batu bara di Kalsel terpaksa berhenti beroperasi karena tindakan aparat kepolisian yang menutup aktivitas usaha sejumlah perusahaan dengan dalih Kepmenhut Nomor 453/Kpts-II/1999.

Terhentinya kegiatan usaha pertambangan tersebut berdampak langsung pada 40 ribu pekerja tambang yang kehilangan pekerjaan dan 25 ribu orang lagi di sektor informalnya.

Solihin mengatakan penutupan KP batu bara yang umumnya milik pengusaha lokal itu terpaksa dilakukan karena pengusaha merasa takut. (DY/N-1)

Dari 1,6 juta hektare kawasan hutan yang ada, seluas 1,4 juta hektare telah dialih fungsikan bagi bidang lain.